

Bocoran Parpol yang akan Dilirik Ridwan Kamil

YOGYAKARTA (IM) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana akan bergabung dengan partai politik di tahun 2022 mendatang. Saat ini Ridwan Kamil sedang menimbang-nimbang akan bergabung dengan partai mana.

"Saya sudah putuskan tahun depan akan masuk parpol. Warna yang mana apakah warna taplak ini (kuning), warna baju satpam (biru) atau hijab merah, saya belum tahu," kata pria akrab disapa Emil di Fisipol UGM, Kamis (2/12).

"Yang pasti yang paling Pancasila, saya akan di situ. Karena menurut saya Pancasila harga mati. Tidak boleh terlalu kiri, tidak boleh terlalu kanan. Politik jalan tengahnya yang saya pilih," imbuh Ridwan.

Ridwan mengaku dirinya

kerap dibully oleh kelompok kanan. Seringkali pula dirinya dibully oleh kelompok kiri.

"Bagi saya yang di tengah. Ini kebutuhan hari ini. Merangkul yang terlalu kanan. Juga merangkul yang terlalu kiri," ungkap Ridwan.

Ridwan membeberkan dirinya banyak belajar dari proses Pilkada yang dialaminya. Dari Pilkada ini, kata Ridwan, ada tiga syarat menjadi pemimpin Indonesia.

"Situ elektabilitas dan kesukaan. Dua ada logistik. Ketiga adalah partai yang mengusung karena sistem demokrasinya seperti itu," tutur Ridwan.

Ridwan menuturkannya, saat ini dirinya baru mempunyai satu syarat yaitu elektabilitas dan kesukaan. Sementara uang atau logistik dan partai politik diakui Ridwan belum dipunyainya. ● pur

PERAYAAN MALAM TAHUN BARU 2022

Sejumlah Jalan di Kota Bandung akan Ditutup

BANDUNG (IM) - Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung pada perayaan tahun baru 2022 bakal ditutup oleh petugas kepolisian. Ada 550 personel menjaga saat perayaan tahun baru 2022 tiba.

Jalan yang akan ditutup pada perayaan tahun baru 2022, mulai dari 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, seperti, Asia Afrika - Tamblong, Nanpan - Tamblong, Braga - Nanpan, Banceuy - Asia Afrika, Lembong - Tamblong, sepanjang Jalan Merdeka, Juanda (Dago) Purnawarman, Dipati Ukur dan Alun-Alun Timur.

"Kami akan mengadakan penutupan di ring satu, yaitu 10 titik di ring satu diberlakukan pada saat malam tahun baru mulai jam 18.00 WIB sampai 05.00 WIB yang akan dijaga Satlantas, Dishub maupun Satpol PP," ujar Kepala Dikyasa Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Asep Kusmana di Balai Kota Bandung, Kamis (2/12).

Kedua, kata Asep Kusmana, akses di tempat keramaian atau lokasi disinyalir akan muncul kerumunan, apabila sudah melewati batas kapasitas.

"Karena level 3 itu mungkin 50 persen yang diperbolehkan,

jadi kalau sudah melebihi kapasitas 50 persen akan diberlakukan penutupan atau pengalihan atau rekayasa ke arah lokasi tersebut," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan memberikan pengecualian terhadap kendaraan yang boleh masuk melintas di ruas jalan yang ditutup. Mereka yang diperbolehkan melintas yaitu kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak atau warga setempat.

"Nanti ada pengecualian untuk penutupan jalan, pengecualian untuk yang akan masuk ke Hotel, penduduk setempat ada kepentingan mendesak, ambulance dan lainnya dan tinggal memberikan keperluan seperti apa," ucapnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan hotel-hotel atau para pelaku usaha yang berada di ruas jalan yang ditutup terkait rencana penutupan jalan.

Selain itu, pada saat malam natal, pihaknya tidak akan melakukan penutupan, mengingat banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah.

"Tapi kami tetap akan melakukan penjagaan dengan ketat," imbuhnya. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

BANJIR ROB MASIH MENGENANGI PEKALONGAN

Foto udara kondisi permukiman warga yang tergenang banjir rob di Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (2/12). Menurut warga setempat, banjir rob yang menggenangi wilayah itu terjadi sejak tiga pekan yang lalu yang membuat aktifitas perekonomian dan pendidikan warga menjadi terganggu, dengan ketinggian air antara 20-50 centimeter.

Proyek Pembangunan Jalan Tegar Beriman Diprediksi Molor ke Tahun 2022

Prediksi molornya proyek pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman itu disebabkan hingga awal Desember 2021 progres pembangunan masih belum sesuai target.

CIBINONG (IM) - Proyek pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman diprediksi akan molor.

Kalangan legislatif maupun eksekutif di lingkungan Pemkab Bogor memprediksi, proyek yang dikerjakan PT. Hutomo Mandala Perkasa dan PT Tureloto Batu Indah ini akan molor ke awal Tahun 2022 mendatang.

Prediksi molornya proyek pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman itu disebabkan hingga awal Desember 2021 progres pembangunan masih belum

sesuai target.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk mengetahui kepastian progres pekerjaannya.

"Kami memprediksi proyek pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman meluncur ke awal tahun 2022," ungkap Sastra Winara, Kamis (2/12). "Segera kami akan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengetahui kepastian progres pekerjaannya," imbuh Sastra Winara.

Sementara itu, Kabag Program dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Bambang Setia Aji saat dimintai komentarnya mengaku proyek yang total nilainya Rp 117,2 miliar tersebut bakal

mengalami defisiensi negatif hingga berpeluang molor ke awal tahun 2022.

"Mungkin, proyek pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman tersebut bakal molor ke tahun 2022. Namun harapan kami tidak banyak memakan waktu karena saya melihat progressnya relatif agak baik," ujarnya.

Bambang Setia Aji mengaku, dirinya bersama Wakil

Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan jajaran lainnya juga akan memonitor progres pembangunan pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman, untuk mengetahui kendala.

"Kami akan mengecek apa kendalanya, lalu segera kami temukan solusinya hingga proyek pedestrian dan peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman bisa tuntas dan baik pelaksanaannya," pungkasnya. ● gio

Penerapan Gage Kota Bandung Diperluas Jadi Delapan Titik

BANDUNG (IM) - Kepala Dikyasa Satlantas Polrestabes Bandung AKP Asep Kusmana mengatakan, penerapan ganjal genap (Gage) di Kota Bandung tetap dilaksanakan pada akhir pekan.

Pada penerapan PPKM level 3 nanti, ganjal genap akan diperluas cakupannya. Dari semula hanya di lima titik yakni gerbang tol Pasteur, Pasirkoja, Kopo, M Toha, Buahbatu. Kini, ditambah tiga kawasan lagi yaitu Ledeng, Ciburu, dan Cibereum.

Menurutnya, pada saat penerapan ganjal genap tersebut akan dibangun pos cek poin untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap pengendara. Setiap pos akan ditempatkan personel gabungan Satlantas Polrestabes Bandung, Dishub, dan Satpol PP Kota Bandung.

"Sanksinya akan diberikan menunggu hasil rapat terbatas besok. Yang pasti, kami mendukung kebijakan pusat," kata Asep di Balai Kota Bandung, Kamis (2/12).

Pelaksanaan ganjal genap itu diakuinya tidak akan jauh berbeda dengan yang saat ini tengah berlangsung pada akhir pekan. Sementara untuk kawasan Ledeng dilaksanakan pada Sabtu dan

Minggu. "Selama penerapan PPKM level 3, ganjal genap dilaksanakan saat akhir pekan. Gage jam 06.00 WIB pagi sampai jam 20.00 WIB malam, di Ledeng Sabtu dan Minggu saja mulai jam 09.00 WIB sampai jam 15.00 WIB," imbuhnya.

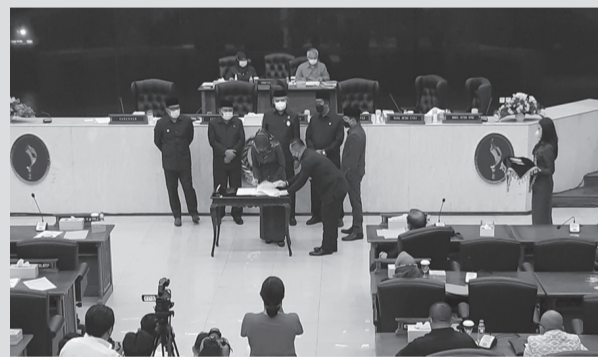
Pelaksanaan gage dilaksanakan terhadap kendaraan di luar pelat Bandung atau D. Namun, mereka yang berpelat luar Bandung tapi berdomisili di Kota Bandung diberikan pengecualian.

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Penertiban Transportasi Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, pengendara yang melakukan perjalanan jauh selama PPKM level 3 harus memperlihatkan hasil tes PCR. Sedangkan untuk perjalanan dekat hasil tes antigen dan mereka pun harus menunjukkan bukti telah divaksin.

"Harus diperiksa minimal dua kali divaksin atau antigen yang perjalanan dekat kalau jauh PCR. Pemeriksaan tersebut sudah dilakukan oleh petugas saat ini," ucapnya.

Asep menambahkan, pengawasan tetap dilaksanakan di terminal terhadap penumpang yaitu pemeriksaan suhu, pengecekan telah divaksin dan antigen. ● pur

DPRD Jabar Setujui 9 dari 13 Raperda yang Diusulkan Gubernur Jabar



BANDUNG (IM) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar menyetujui 9 dari 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Gubernur Jawa Barat.

Persetujuan ini, setelah sebelumnya dikaji oleh Bapemperda bersama Biro Hukum dan HAM serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul yang pada akhirnya Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Jabar hanya dapat menyetujui sebanyak 9 Raperda.

Ke sembilan (9) Raperda sudah dilengkapi dengan naskah akademik dan juga sudah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jabar. Selanjutnya akan ditindak lanjut dalam Propempera tahun 2022, kata Kusnadi saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Selasa (2/11) lalu.

Adapun ke sembilan Raperda yang masuk propempera, dibagi berdasarkan skala prioritas I, II dan III. Untuk skala prioritas I ada 4 Raperda terdiri dari : Raperda tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di provinsi Jabar; Raperda tentang sistem kesejahteraan lanjut usia; Raperda tentang Perlindungan Perempuan; Raperda tentang Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Raperda tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya Raperda skala prioritas II ada 3 Raperda yaitu Raperda tentang perubahan kedua atas Raperda Jabar No 13 tahun 2011 tentang Pajak daerah; Raperda tentang Tenaga Kesehatan dan Raperda tentang Upaya Kesehatan.

Sedangkan skala prioritas III hanya 1 raperda yaitu raperda tentang pembubaran PD Agribisnis dan Pertambangan kata Kusnadi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Adapun terkait Raperda usul prakarsa DPRD yang belum selesai pembahasannya pada tahun 2021, akan diluncurkan kembali pada Propempera tahun 2022 dengan skala prioritas I.

Usulan Raperda Prakarsa DPRD Jabar tersebut terdiri dari Raperda tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jabar dan Raperda tentang Kepariwisata di Provinsi Jabar.

Lebih lanjut Kusnadi

yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, Bapemperda DPRD Jabar minta agar Pemprov Jabar memperhatikan penganggaran penyusunan Raperda, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Bapemperda juga minta kepada Biro Hukum dan HAM Setda Jabar untuk mengkoordinir penyusunan naskah akademik dan raperda yang belum selesai dibuat oleh OPD selaku pengusul Raperda.

Selanjutnya, Bapemperda juga minta kepada Biro Hukum dapat berkonsultasi kembali dengan Kemendagri khususnya Direktur Produk Hukum Daerah terhadap Raperda-raperda yang diajukan dalam Propempera tahun 2022, dan raperda yang berdampak oleh UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan target ke 9 Raperda usulan Gubernur dan 2 Raperda prakarsa DPRD dapat diharapkan selesai di awal tahun sidang 2022, untuk skala prioritas I yaitu 4 Raperda dari usulan Gubernur dan 2 Raperda prakarsa DPRD sudah mulai dibahas.

Dengan demikian, jelang akhir tahun sidang 2022, sembilan Raperda usulan Gubernur ditambah 2 Raperda prakarsa dapat tuntas. Jadi tidak ada tunggakan di tahun 2023 mendatang, tandasnya. ● lys



IDN/ANTARA

PELESTARIAN BATIK MOTIF PALEMBANG

Sejumlah peserta melukis motif batik dengan cantik pada workshop pembuatan batik Palembang di Museum Balaputra Dewa Palembang, Sumsel, Kamis (2/12). Workshop pembuatan batik Palembang ini merupakan kegiatan pelestarian batik motif Palembang pada masyarakat khususnya generasi muda.

Sehari 3 Kejadian, Bencana Alam di Kab. Bogor Terbanyak se-Indonesia

CIBINONG (IM) - Meskipun jumlah bencana alam di Kabupaten Bogor tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jabar, Bogor masih berada di urutan pertama.

Jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor pada Januari-November 2021 sebanyak 1.204 kejadian. Sementara di 2020, jumlah kejadian di Kabupaten Bogor mencapai 1.319 kejadian.

Walaupun terjadi penurunan angka kejadian Kabupaten Bogor masih di peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia.

Peringkat kedua dan kelima daerah terbanyak kejadian bencana alam di Provinsi Jawa Barat ialah Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bandung.

Jika dilihat perbulan, angka kerawanan bencana alam di Bumi Tegar Beriman ini terjadi pada Bulan Februari, November dan Mei, di mana telah terjadi 245, 129 dan 128 kejadian bencana alam di tiga bulan tersebut.

"Pada Tahun 2020 lalu, kejadian bencana alam terjadi di 26 kecamatan dan 128 desa, tahun ini kejadian bencana alam terjadi di 38 kecamatan dan 87 desa," ucap Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Da-

erah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi Pranowo kepada wartawan beberapa hari lalu.

Tahun lalu, tambahnya, peringkat teratas kejadian bencana alam ada di Kecamatan Megamendung yaitu 87 kejadian, 72 kejadian di Kecamatan Citeureup, 67 kejadian di Kecamatan Caringin, 62 kejadian di Kecamatan Pamijahan dan 52 kejadian di Kecamatan Cijeruk.

"Tahun ini, peringkat teratas ialah Kecamatan Cijeruk 86 kejadian bencana alam, Cigombong 84 kejadian, Megamendung 78 kejadian, Cibinong 69 kejadian dan Ciomas 55 kejadian bencana alam," tambahnya.

Dari segi kebencanaan alam, kejadian tanah longsor masih yang tertinggi jumlah kejadiannya, disusul angin kencang, banjir, pergeseran tanah, kebakaran, kekeeringan dan gempa bumi.

"Kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor hingga akhir Bulan November kemarin, 5 orang warga menjadi korban yang meninggal dunia. 361 unit rumah mengalami kerusakan tingkat ringan hingga hancur," katanya.

Selain itu, sarana ibadah, sekolah, sarana sosial, sarana umum hingga sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pengairan juga mengalami kerusakan hingga menimbulkan kerugian materi. ● gio